

**STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM
PEMANFAATAN DANA ALOKASI NAGARI (DI
NAGARI LIMO KAUM SUMATERA BARAT)**

SKRIPSI

Oleh:

FIDYA RIZKY AMALIA

NPM : 1403110033

Program Studi Ilmu Komunikasi

Konsentrasi : Public Relations



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

M E D A N

2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : FIDYA RIZKY AMALIA

NPM : 1403110033

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Judul Skripsi : STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM PEMANFAATAN DANA ALOKASI NAGARI (DI NAGARI LIMO KAUM SUMATERA BARAT)

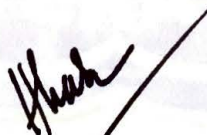
Medan, 28 Maret 2018

Pembimbing



PUJISANTOSO, S.S., M.SP

Disetujui Oleh
KETUA PROGRAM STUDI



NURHASANAH NASUTION, S.Sos., M.I.Kom



Plt. Dekan

Dr. RUDIANTO, M.Si

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : FIDYA RIZKY AMALIA

NPM : 1403110033

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Pada hari : Rabu, 28 Maret 2018

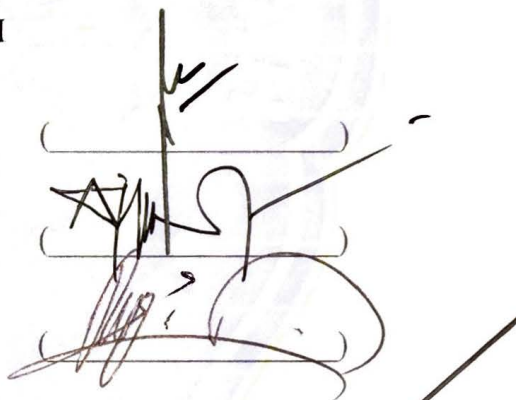
Waktu : 08.00 s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. YAN HENDRA, M.Si

PENGUJI II : JUNAIDI, S.PdI, M.Si

PENGUJI III : PUJI SANTOSO, S.S, M.SP



PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. RUDIANTO, M.Si




Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Fidya Rizky Amalia, NPM 1403110033, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk perbuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, sata bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 28 Maret 2018

Yang menyatakan,



Fidya Rizky Amalia

Abstrak

Dana Alokasi Nagari (ADN) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang pada umumnya masih menjadi sumber pendapatan utama yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 96 menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kabupaten diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD serta 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Maka dengan adanya kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) mengikutkan masyarakat desa dalam proses pembangunan. Peran masyarakat desa diperlukan untuk menumbuhkan sifat sosial dan mendukung jalannya pembangunan serta strategi komunikasi seorang Wali Nagari juga sangat mempengaruhi proses berjalannya pembangunan yang dilakukan untuk Nagari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Pemanfaatan Dana Alokasi Nagari (di Nagari Limo Kaum Sumatera Barat). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Yakni melakukan wawancara mendalam (*Dept Interviews*) dan menyajikan fakta secara nyata dan relevan sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang terjalin antara Wali Nagari dan masyarakat terjalin dengan sangat baik dengan menggunakan komunikasi interpersonal.

Kata Kunci : Strategi Komunikasi, Komunikasi Interpersonal, Dana Alokasi Nagari, Nagari Limo Kaum.

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Salam dan shalawat tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Banyak pengalaman yang terjadi selama peneliti termasuk kesulitan-kesulitan dan berbagai hambatan yang harus dihadapi peneliti. Rasa terimakasih yang amat besar dari peneliti untuk dosen pembimbing yang rasanya tidak dapat membalas segala waktu dan perhatian yang diberikan selama pengerjaan penelitian ini, begitupun, peneliti masih menyadari adanya kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini, maka dari itu peneliti berharap akan adanya masukan maupun kritik yang dapat menyempurnakan. Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga dihantarkan kepada Ayahanda tercinta, Sofiandy, dan Ibunda tersayang, Nurdiana Chaniago atas dukungan moril dan materil yang merupakan alasan bagi peneliti untuk selalu bersemangat melangkah sampai sejauh ini.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti banyak menerima bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Rudianto, S.sos., M.Si selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Alm. Bapak Drs. Tasrif Syam, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus sebagai dosen pembimbing.
4. Bapak Drs. Zulfahmi M.I.Kom selaku Wakil Dekan I dan Bapak Abrar Adhani S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nurhasanah Nasution, S.Sos., M.I.Kom selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi dan Bapak Akhyar Anshori S.sos., M.I.Kom selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi.
6. Bapak Puji Santoso S.s., M. Sp selaku pengganti dosen pembimbing.
7. Bapak Gusrial selaku Wali Nagari Limo Kaum Sumatera Utara.
8. Narasumber Bapak Altri Selaku Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dan Bapak Risman selaku Ketua Tokoh Pemuda Nagari Limo Kaum Sumatera Barat.
9. Keluarga tercinta, Kakak Debby Rizky Yolanda, Abang Muhammad Fandi Ariza, dan Adik Salsabila Rizky Zahra yang selalu mendukung penulis selama masa perkuliahan.

10. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terimakasih telah banyak memberikan ilmu bagi penulis.
11. Pegawai Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kak Dini, Bang Ucok, Bang Lindung yang telah mengarahkan penulis tentang proses perkuliahan selama masa perkuliahan ini berlangsung.
12. Para sahabat yang setia membantu dan banyak memberikan dukungan serta mendengar keluh kesah penulis, Dhara Suci Dwi Lestari, Khairiza Ulfa, Meilinda Rahmasari Rifendra, Gita Nurul Ramdhani, Helfy Rahmi Yurizma, Muhammad Irfan dan terkhusus Dzul Amri Luthfi.
13. Kawan-kawan seperjuangan Siti Ramadianti, Ria Ananda, Melati Kuntarsi, Maya Septiani, Chairil Mauriza, Intan Ariska, Arsindi Larastika dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
14. Kakak Miko dan Abang Teri yang telah banyak membantu penulis selama penelitian di Limo Kaum Sumatera Barat.
15. Teman-teman seperjuangan 7 IKO B Sore.
16. Teman-teman Ilmu Komunikasi stambuk 2014 yang telah memberikan berbagai informasi kepada penulis selama masa perkuliahan hingga pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. Sekiranya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang diberikan semua pihak.

Medan, Maret 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penelitian	7
BAB II : URAIAN TEORITIS	
A. Komunikasi	9
B. Strategi Komunikasi	13
C. Komunikasi Pembangunan	16
D. Komunikasi Interpersonal.....	18
E. Komunikasi Organisasi	23
F. Kepala Desa	26
G. Alokasi Dana Desa	28
H. Nagari Limo Kaum.....	35
BAB III : METODE PENELITIAN	
1. Jenis Penelitian.....	51
2. Narasumber	53
3. Kerangka Konsep	53

4. Definisi Konsep.....	54
5. Teknik Pengumpulan Data	55
6. Teknik Analisis Data	56
7. Lokasi dan Waktu Penelitian	56

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN.....

1. Wawancara Narasumber.....	58
2. Hasil Pembahasan	65

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIYAWAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Dengan demikian strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi untuk mencapai suatu tujuan.

Strategi komunikasi juga merupakan penentu berhasil atau tidaknya kegiatan komunikasi secara efektif, begitupun dengan Pemerintah Desa yang melakukan sebuah strategi komunikasi dalam pemanfaatan Dana Alokasi Desa (DAN). Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan operasionalnya secara taktis harus dilakukan dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda-beda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi.

Penyebaran informasi sangat diperlukan mengenai pemanfaatan Dana Alokasi Desa agar masyarakat mengetahui bagaimana seorang Kepala Desa mengelola dana untuk Desa tersebut. Strategi komunikasi merupakan hal terpenting yang harus dilakukan guna menyampaikan pesan atau informasi kepada publik atau masyarakat. Faktor komunikasi merupakan hal yang paling fundamental dalam bagaimana dana yang telah disalurkan atau yang telah ada dapat dimanfaatkan dengan baik dan berguna bagi masyarakat Desa, melalui elemen-elemen strategi komunikasi yaitu komunikator, pesan yang disampaikan, saluran atau media yang

digunakan, penerima pesan sampai pada pengaruh atau efek yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal.

Komunikasi pembangunan yang diutamakan adalah kegiatan mendidik dan memotivasi masyarakat, bukannya memberikan laporan yang tidak realistis dari fakta-fakta atau sekedar penonjolan diri. Secara pragmatis, dapat dirumuskan bahwa komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komunikasi pembangunan merupakan suatu inovasi yang diterima oleh masyarakat.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang baik di bidang Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pada perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kepada Kabupaten/Kota

didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam operasionalisasi desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan Kepada Desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Dana Alokasi Dana Desa kepada setiap desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Alokasi Dana Desa diberikan oleh Pemerintah Pusat yang diperoleh dari Dana Perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian.

Dengan adanya pemberian ADD ini semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam pembangunan desa. Walaupun di dalam Undang-Undang

otonomi daerah telah disebutkan bahwa Pemerintah diarahkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, bukan berarti bahwa Pemerintah Pusat lepas tangan dari pengawasan pembangunan yang terdapat di daerah.

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat Pemerintahan.

Pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus memenuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Hal itu dapat terjadi dengan melakukan Komunikasi Interpersonal (komunikasi tatap muka).

Komunikasi Interpersonal merupakan komunikasi antar komunikator dan komunikan, komunikasi ini dianggap paling efektif dalam mengubah pola pikir, sikap, pendapat atau perilaku seseorang. Hal ini tentu akan lebih membantu seorang Kepala Desa dalam menyampaikan informasi mengenai Alokasi Dana Desa.

Pada penelitian ini mengkaji Alokasi Dana Desa pada wilayah Nagari Limo Kaum. Limo kaum adalah sebuah Nagari (sebutan lain desa) di Sumatera Barat yang berada di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Dalam sejarahnya, di Nagari Limo Kaum inilah dicetuskannya pemikiran oleh Datuak Perpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumangguangan untuk membentuk sistem Kelarasan (Pemerintahan) Bodi Caniago dan Koto Pilliang yang keduanya sampai saat ini tetap diberlakukan sebagai sistem adat di Minang Kabau.

Nagari ini memiliki situs Cagar Budaya Batu Basurek terdapat di Jorong Kubu Rajo yang merupakan peninggalan Raja Aditiawarman dan Batu Batikam di Jorong Dusun Tuo yang disebut sebagai prasasti ikrar kesepakatan pelaksanaan sistem Kelarasan Bodi Caniago dan Koto Pilliang antara Datuak Perpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumangguangan. Dalam melaksanakan Administrasi Nagari serta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Wali Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari yang terdiri dari Sekretaris Nagari, 5 (lima) Kepala Urusan serta 8 (delapan) Kepala Jorong.

Berdasarkan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2001 tentang Sistem Pemerintahan Nagari yang telah diubah dengan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari maka sebanyak 8 (delapan) Pemerintahan Kelurahan dan Desa yang ada dalam kenagarian Limo Kaum digabung menjadi satu wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari sebagaimana sebelum diberlakukannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dengan 8 (delapan) Jorong, yaitu Jorong Dusun Tuo, Koto

Gaduh, Balai Batu, Tigo Tumpuak, Balai Labuah Ateh, Balai Labuah Bawah, Kubu Rajo dan Pilliang.

Atas dasar pemikiran dan asumsi sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Pemanfaatan Dana Alokasi Nagari (di Nagari Limo Kaum Sumatera Barat).”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Pemanfaatan Dana Alokasi Nagari (di Nagari Limo Kaum Sumatera Barat)?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, maka dianggap perlu untuk membuat pembatasan masalah, yaitu: Dana Alokasi Nagari yang diteliti hanya Tahun 2017.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Pemanfaatan Dana Alokasi Nagari (di Nagari Limo Kaum Sumatera Barat).

2) Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini ialah:

- a. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah penelitian komunikasi, referensi, sumber bacaan khususnya mengenai Strategi Komunikasi Pembangunan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa.
- b. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan Strategi Komunikasi Pembangunan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa.
- c. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa/I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya jurusan Ilmu Komunikasi.

E. Sistematika Penulisan

Untuk membahas sistematika yang ada, maka penulis dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I Berisikan Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Berisikan Uraian Teoritis yang menguraikan tentang Komunikasi, Strategi Komunikasi, Komunikasi Pembangunan, Komunikasi Interpersonal, Komunikasi Organisasi, Kepala Desa, Alokasi Dana Desa, dan Nagari Limo Kaum.

- BAB III Berisikan Persiapan dan pelaksanaan penelitian yang menguraikan tentang Metode Penelitian, Narasumber, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Deskripsi Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.
- BAB IV Berisikan Analisis Data yang menguraikan Wawancara, Pembahasan serta Hasil Dokumentasi.
- BAB V Berisikan Penutup yang menguraikan Simpulan dan Saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Komunikasi

1. Pengertian Komunikasi

Komunikasi berasal dari bahasa latin yaitu "*Communis*" atau "*Common*" dalam bahasa Inggris yang berarti sama. Berkomunikasi berarti kita sedang berusaha untuk mencapai kesamaan makna. "*Communes*" atau dengan ungkapan lain. Melalui komunikasi kita mencoba berbagai informasi, gagasan atau sikap kita kepada partisipan lainnya. Kendala utama dalam berkomunikasi adalah kita sering mempunyai makna yang berbeda terhadap lambang yang sama. Oleh karena itu, komunikasi seharusnya dipertimbangkan sebagai aktivitas di mana tidak ada tindakan atau ungkapan yang diberi makna secara penuh, kecuali jika diidentifikasi oleh partisipan komunikasi yang terlibat (bungin, 2008:253).

Setiap pelaku komunikasi dengan demikian akan melakukan empat tindakan: membentuk, menyampaikan, menerima, dan mengolah pesan. Ke-empat tindakan tersebut lazimnya terjadi secara berurutan. Membentuk pesan artinya menciptakan sesuatu ide atau gagasan. Ini terjadi dalam benak kepala seseorang melalui proses kerja sistem syaraf. Pesan yang telah terbentuk ini kemudian disampaikan kepada orang lain. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk dan mengirim pesan, seseorang akan menerima pesan yang disampaikan oleh orang lain. Pesan yang diterimanya ini kemudian akan diolah melalui sisten syaraf dan diinterpretasikan. Setelah diinterpretasikan, pesan tersebut dapat

menimbulkan tanggapan atau reaksi dari orang tersebut. Apabila ini terjadi, maka si orang tersebut kembali akan membentuk dan menyampaikan pesan baru. Demikianlah ke-empat tindakan ini akan terus-menerus terjadi secara berulang-ulang.

2. Unsur-Unsur Komunikasi

Menurut Harold Lasswell (Mulyana, 2007:69) menyebutkan lima unsur komunikasi yang saling bergantung satu sama lain, yaitu:

- a. Sumber (*source*) atau (*encoder*) atau komunikator (*communicator*) atau pembicara (*speaker*) atau originator adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Sumber boleh jadi seorang individu, kelompok, organisasi, perusahaan, atau bahkan suatu Negara.
- b. Pesan, yaitu apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal dan nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, atau maksud sumber tadi. Pesan mempunyai komponen yaitu: makna, simbol yang digunakan untuk menyampaikan makna, dan bentuk atau organisasi pesan. Pesan bisa disampaikan melalui tindakan atau isyarat anggota tubuh (acungan jempol, anggukan kepala, senyuman, tatapan mata, dan sebagainya).
- c. Saluran atau media, yakni alat atau wadah yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Saluran boleh jadi merujuk pada bentuk pesan yang disampaikan kepada penerima, apakah saluran verbal atau saluran nonverbal. Saluran juga merujuk pada penyajian pesan

apakah langsung (tatap muka) atau lewat media cetak (surat kabar, majalah) atau media elektronik (radio, televisi).

- d. Penerima (*receiver*) atau (*destination*) atau (*decoder*) atau komunikate (*communicatee*) atau khalayak (*audience*) atau pendengar (*listener*) atau penafsiran (*interpreter*) adalah orang yang menerima pesan dari sumber. Berdasarkan pengalaman masa lalu, rujukan nilai, pengetahuan, persepsi, pola pikir, dan pesannya, penerima pesan ini menerjemahkan atau menafsirkan seperangkat simbol verbal atau nonverbal yang ia terima menjadi gagasan yang dapat ia pahami. Proses ini disebut penyandian balik (*decoding*).
- e. Efek, yaitu apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan tersebut, misalnya penambahan pengetahuan (dari tidak tahu menjadi tahu), terhibur, perubahan sikap (dari tidak setuju menjadi setuju), perubahan keyakinan, perubahan perilaku (dari tidak bersedia membeli barang yang ditawarkan menjadi bersedia membelinya), dan sebagainya.

3. Faktor-Faktor Lain yang Perlu diperhatikan dalam Proses Komunikasi

Menurut Cultip dan Center dalam Widjaja (2000:39), komunikasi yang efektif harus dilaksanakan dengan melalui 4 tahap, yaitu:

- a. *Fact Finding*

Menyarikan dan mengumpulkan fakta dan data sebelum seseorang melakukan kegiatan komunikasi. Untuk berbicara di depan suatu

masyarakat perlu dicari fakta dan data tentang masyarakat tersebut, keinginannya, komposisinya, dan sebagainya.

b. *Planning*

Berdasarkan fakta dan data itu dibuatkan rencana tentang apa yang akan dikemukakan dan bagaimana mengemukakannya. Bagi suatu masyarakat yang agraris tentu saja pengemukakan komunikasi haruslah menggunakan cara yang sesuai dengan ciri-ciri agraris.

c. *Communicating*

Setelah *planning* disusun maka tahap selanjutnya adalah *communicating*/berkomunikasi.

d. *Evaluation*

Penilaian dan analisis kembali diperlukan untuk melihat bagaimana hasil komunikasi tersebut. Ini kemudian menjadi bahan bagi perencanaan melakukan komunikasi selanjutnya.

4. Fungsi dan Tujuan Komunikasi

Fungsi komunikasi secara garis besar ialah bahwa komunikasi tidak hanya berupa proses penyampaian dan penerimaan informasi saja, tetapi juga memiliki peran dan fungsi sebagai proses membangun hubungan antara sesama pelaku komunikasi.

Dengan demikian, intisari komunikasi adalah suatu berita. Komunikasi juga digunakan untuk mengembangkan hubungan antar teman dan membangun

kepercayaan antarindividu dan pertemanan seseorang dalam organisasi. (Nurjaman, 2012:44-45)

Sedangkankan tujuan komunikasi ialah mengharapkan pengertian, dukungan, gagasan dan tindakan. Setiap kali kita bermaksud mengadakan komunikasi maka kita perlu meneliti apa yang menjadi tujuan kita, apakah kita ingin menjelaskan sesuatu kepada orang lain atau apakah kita ingin agar orang lain mengerjakan sesuatu.

B. Strategi Komunikasi

1. Pengertian Strategi Komunikasi

Kata “strategi” berasal dari akar kata bahasa Yunani *strategos* yang secara harfiah berarti “seni umum” yang berubah menjadi kata sifat *strategia* berarti “keahlian militer” yang belakangan diadaptasikan lagi ke dalam lingkungan bisnis modern. Kata *strategos* bermakna sebagai berikut:

1. Keputusan untuk melakukan suatu tindakan dalam jangka panjang dengan segala akibatnya.
2. Penentuan tingkat kerentanan posisi kita dengan posisi para pesaing (ilmu perang dan bisnis).
3. Pemanfaatan sumber daya dan penyebaran informasi yang relatif terbatas terhadap kemungkinan penyadap informasi oleh para pesaing.
4. Penggunaan fasilitas komunikasi untuk penyebaran informasi yang menguntungkan berdasarkan analisis geografis dan topografis.

5. Penemuan titik-titik kesamaan dan perbedaan penggunaan sumber daya dalam pasar informasi.

Strategi komunikasi adalah:

1. Strategi yang mengartikulasikan, menjelaskan, dan mempromosikan suatu visi komunikasi dan satu tujuan dalam suatu rumusan yang baik.
2. Strategi untuk menciptakan komunikasi yang konsisten, komunikasi yang dilakukan berdasarkan satu pilihan (keputusan) dari beberapa pilihan komunikasi.
3. Strategi berbeda dengan taktik, strategi komunikasi menjelaskan tahapan konkret dalam rangkaian aktivitas komunikasi yang berbasis pada satuan teknik bagi pengimplementasian tujuan komunikasi. Adapun taktik adalah satu pilihan tindakan komunikasi tertentu berdasarkan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Tujuan akhir komunikasi, strategi berperan memfasilitasi perubahan perilaku untuk mencapai tujuan komunikasi manajemen.

Karena itu, maka strategi komunikasi selalu dihubungkan dengan:

1. Siapa saya bicara.
2. Maksud apa saya bicara.
3. Pesan apa yang harus disampaikan kepada seseorang.
4. Cara bagaimana saya menyampaikan pesan kepada seseorang.
5. Bagaimana mengukur dampak pesan tersebut. (Liliweri,2011: 240)

Adapun tujuan dari strategi komunikasi adalah (Liliweri,2011: 248-249):

- Memberitahu
- Memotivasi
- Mendidik
- Menyebarkan informasi
- Mendukung pembuatan keputusan

2. Teori Dalam Strategi Komunikasi

Dalam hal strategi dalam bidang apa pun tentu harus didukung dengan teori. Begitu juga pada strategi komunikasi harus didukung dengan teori, dengan teori merupakan pengetahuan mendasar pengalaman yang sudah diuji kebenarannya. Karena teori merupakan suatu *statement* (pernyataan) atau suatu konklusi dari beberapa *statement* yang menghubungkan (mengkorelasikan) suatu *statement* yang satu dengan *statement* lainnya.

Dari sekian banyak teori komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli, untuk strategi komunikasi yang memadai adalah teori dari seorang ilmuwan politik dari Amerika Serikat yang bernama Harold D. Lasswell yang menyatakan bahwa cara terbaik untuk menerangkan kegiatan komunikasi atau cara untuk menggambarkan dengan tepat sebuah tindak komunikasi ialah menjawab pertanyaan “*Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect ?* (siapa mengatakan apa dengan cara apa kepada siapa dengan efek bagaimana).

C. Komunikasi Pembangunan

1. Pengertian Komunikasi Pembangunan

Secara pragmatis, dapat dirumuskan bahwa komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara. Dalam arti yang luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik) di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan. Terutama antara masyarakat dengan pemerintah. Sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan. Sedangkan dalam arti sempit merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan, dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakasai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan.

2. Tujuan Komunikasi Pembangunan

Tujuan komunikasi pembangunan ialah untuk memajukan pembangunan. Pembangunan memerlukan agar rakyat yang mempunyai kadar huruf serta pendapatan dan sosio-ekonomi yang rendah, haruslah diberitahu mengenai ide dan kemahiran yang belum mereka kenal, dalam jangka waktu yang singkat.

Hal ini dinyatakan oleh Nora C. Quebral dalam Harun (2012:162), yaitu:

“Tujuan komunikasi pembangunan adalah mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan menginginkan bahwa sekelompok massa orang-orang dengan tingkat literasi (melek huruf) dan penghasilan rendah, dan

atribut-atribut sosio-ekonomi bahwa mereka harus berubah, pertama-tama semua menjadi terbuka tentang informasi dan dimotivasi untuk menerima dan menggunakan secara besar-besaran ide-ide dan keterampilan-keterampilan yang tidak familiar dalam waktu singkat dibanding proses yang diambil dalam keadaan normal.

3. Strategi Komunikasi Pembangunan

Menurut AED dalam Harun (2012:164), ada empat strategi komunikasi pembangunan yang telah digunakan selama ini, yaitu :

1. Strategi-strategi berdasarkan media
2. Strategi-strategi desain instruksional
3. Strategi-strategi partisipatori
4. Strategi-strategi pemasaran

Masing-masing strategi mencerminkan suatu rangkaian prioritas tertentu mengenai bagaimana menggunakan komunikasi untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan pembangunan. Kategori ini sendiri tidak dimaksudkan dalam arti yang kaku, karena dalam kenyataannya bukan sedikit program komunikasi pembangunan yang merupakan gabungan dari beberapa strategi.

Strategi berdasarkan media: para komunikator yang menggunakan strategi ini biasanya mengelompokkan kegiatan mereka di sekitar medium tertentu yang mereka sukai. Strategi ini memang merupakan teknik yang paling mudah, paling populer, dan tentunya yang paling kurang efektif.

Strategi Desain Instruksional: menggunakan strategi ini pada umumnya adalah para pendidik. Mereka itu memfokuskan strateginya pada pembelajaran individu-individu yang dituju sebagai suatu sasaran yang fundamental. Strategi kelompok ini, mendasarkan diri pada teori-teori belajar formal, dan berfokus pada pendekatan sistem untuk pengembangan bahan-bahan (material) belajar.

Strategi Partisipasi: dalam strategi ini, prinsip-prinsip penting dalam mengorganisasi kegiatan adalah kerja sama komunitas dan pertumbuhan pribadi (*community participation and personal growth*). Yang dipentingkan dalam strategi ini bukan pada berapa banyak informasi yang dipelajari seseorang melalui program komunikasi pembangunan, tetapi lebih pada pengalaman keikutsertaan sebagai seseorang yang sederajat (*equal*) dalam proses berbagai pengetahuan atau keterampilan.

Strategi Pemasaran: strategi ini tumbuh sebagai suatu strategi komunikasi yang sifatnya paling langsung dan terasa biasa.

D. Komunikasi Interpersonal

Definisi komunikasi interpersonal ialah komunikasi yang paling efektif yang didalamnya terdapat seorang komunikator dan komunikan yang saling melakukan komunikasi demi tersampainya sebuah pesan yang mampu mengubah pola pikir, sikap dan perilaku seseorang yang bersifat secara langsung sehingga komunikator dapat mengetahui bagaimana tanggapan dan respon komunikan di saat itu juga. Apakah memiliki respon positif ataupun negatif sehingga komunikator dapat

melakukan sesi pertanyaan apabila konsumen tidak puas dengan jawaban atau penjelasan dari komunikator tersebut.

1. Pentingnya Hubungan Interpersonal

Menurut William Achutz dalam Wood (2013, 12-13), seorang psikolog, mengembangkan teori mengenai kebutuhan interpersonal. Ia menegaskan bahwa hubungan interpersonal yang berkelanjutan tergantung dari seberapa baik hak tersebut berkaitan dengan tiga kebutuhan dasar. Kebutuhan pertama adalah *afeksi*, yaitu keinginan untuk memberi dan mendapatkan kasih sayang. Kebutuhan kedua adalah *inklusif*, yaitu keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok tertentu. Kebutuhan ketiga adalah *control*, yaitu kebutuhan untuk mempengaruhi orang atau peristiwa dalam kehidupan.

2. Komponen-Komponen Komunikasi Interpesonal

Dalam proses komunikasi terdapat 9 komponen komunikasi (Aw, 2011:7-9) yaitu:

1. *Sumber/komunikator* yaitu orang yang mempunyai kegiatan untuk berkomunikasi.
2. *Encoding* yaitu tindakan memformulasikan isi pikiran ke dalam simbol-simbol, kata-kata sehingga komunikator merasa yakin dengan pesan yang disusun dan cara penyampaiannya.
3. *Pesan* yaitu hasil dari *encoding*.

4. *Saluran* yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber ke penerima.
5. *Penerima/komunikan* yaitu seseorang yang menerima, memahami pesan.
6. *Decoding* yaitu kegiatan internal dalam diri penerima. Misalnya telinga mendengar suara atau bunyi, mata melihat obyek dan sebagainya. Proses sensasi dilanjutkan dengan persepsi, yaitu proses memberi makna atau *decoding*.
7. *Respon* yaitu tanggapan terhadap pesan.
8. *Gangguan (noise)* yaitu gangguan atau membuat kacau penyampaian dan penerimaan pesan.
9. *Konteks komunikasi* yaitu merujuk pada tiga dimensi yaitu ruang, waktu, dan nilai (adat istiadat dan norma sosial).

3. Model Komunikasi Interpersonal

Ada beberapa model komunikasi dalam komunikasi interpersonal (Wood, 2013: 19-21) yaitu:

1. Model Linear

Dalam komunikasi interpersonal digambarkan sebagai bentuk linear atau searah, proses dimana seseorang bertindak terhadap orang lain. Ini adalah model lisan yang terdiri dari lima pertanyaan yaitu:

Siapa?

Apa yang dikatakan?

Sedang berbicara dimana?

Berbicara pada siapa?

Apa dampak dari pembicaraan tersebut?

Model linear awal ini memiliki kekurangan yang nyata. Hal tersebut digambarkan sebagai komunikasi satu arah dari pengirim ke penerima pasif. Implikasi adalah pendengar tidak pernah mengirim pesan dan hanya menyerap secara pasif apa yang dikatakan oleh pembicara. Sebagai respons dari komunikator, pendengar biasanya akan mengangguk, mengerutkan dahi, tersenyum, terlihat bosan dan tidak tertarik. Terdapat kekeliruan dalam Model Linear, yaitu menampilkan proses mendengar sebagai tahap setelah proses berbicara, padahal pada kenyataan, berbicara dan mendengar adalah dua proses yang terjadi secara bersamaan. Ketika berkomunikasi di dunia maya, begitu kita mengirim pesan, saat itu juga kita dapat menerima pesan balasan dari lawan bicara. Orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi sering kali mengirimkan dan menerima pesan, serta beradaptasi antara satu dengan lainnya.

2. Model Interaktif

Model interaktif menggambarkan komunikasi sebagai proses di mana pendengar memberikan umpan balik sebagai respon terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Model interaktif menyadari bahwa komunikator menciptakan dan menerjemahkan pesan dalam konteks pengalaman pribadinya. Semakin banyak pengalaman seorang komunikator dalam berbagai kebudayaan, akan semakin baik pemahamannya terhadap orang lain. Ketika

pengalaman berkomunikasi masih minim, kesalahpahaman sangat mungkin terjadi.

3. Model Transaksional

Yaitu menekankan pada pola komunikasi yang dinamis dan berbagai peran yang dijalankan seseorang selama proses interaksi. Salah satu ciri dan model ini adalah penjelasan mengenai waktu dan menunjukkan fakta bahwa pesan, gangguan, dan pengalaman senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Model transaksional menganggap bahwa gangguan muncul di seluruh proses komunikasi interpersonal. Pengalaman dari setiap komunikator dan pengalaman yang dibagikan dalam proses komunikasi berubah setiap waktu. Ketika bertemu dengan orang baru dan menemukan pengalaman yang memperkaya perspektif, kita mengubah cara berinteraksi dengan orang lain. Interaksi yang dilakukan intens dalam waktu cukup lama akan membuat hubungan personal menjadi semakin santai dan akrab.

Model komunikasi transaksional tidak melihat seseorang berperan sebagai komunikator maupun komunikan. Kedua pihak yang berkomunikasi berada dalam posisi setara dan saling bertukar pesan secara bersamaan. Artinya, selama proses berkomunikasi, anda bisa jadi pihak yang mengirimkan pesan (dengan berbicara atau menganggukan kepala), menerima pesan, atau melakukan keduanya dalam waktu bersamaan (menginterpretasikan pesan dari orang lain sambil menganggukan kepala sebagai tanda setuju). Oleh karena komunikasi interpersonal melibatkan banyak orang, maka di dalamnya terdapat

tanggung jawab etika. Perilaku verbal dan non verbal bersifat *resipokal*, saling mempengaruhi satu sama lain.

E. Komunikasi Organisasi

1. Definisi Komunikasi Organisasi

Menurut Schein dalam Muhammad (2014: 23) organisasi ialah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab. Schein mengatakan bahwa organisasi mempunyai karakteristik tertentu yaitu struktur, tujuan, saling berhubungan satu bagian dengan bagian lainnya dan tergantung kepada komunikasi manusia untuk mengkoordinasikan aktivitas dalam organisasi tersebut. Sifat tergantung antara satu bagian dengan bagian lain menandakan bahwa organisasi yang dimaksudkan Schein ini adalah merupakan suatu sistem.

Menurut Goldhaber dalam Muhammad (2014: 67) memberikan definisi komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah.

2. Karakteristik Organisasi

Organisasi memiliki beberapa karakteristik yaitu (Muhammad,2014: 29):

a. Dinamis

Organisasi sebagai suatu sistem terbuka terus menerus mengalami perubahan, karena selalu menghadapi tantangan baru dari lingkungan yang selalu berubah tersebut. Adapun 3 faktor dari sifat dinamis ini ialah:

- 1) Faktor perubahan ekonomi dalam lingkungannya karena semua organisasi memerlukan sumber keuangan untuk melakukan aktiitasnya.
- 2) Adanya perubahan pasaran karena kebanyakan organisasi pasarannya adalah hasil produksi atau pelayanan.
- 3) Adanya perubahan kondisi sosial karena semua organisasi bergantung pada bakat dan inisiatif manusia maka organisasi mesti tetap dinamis untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial.

4) Memerlukan Informasi

Semua organisasi memerlukan informasi untuk hidup. Tanpa organisasi tidak dapat jalan. Dengan adanya informasi bahan mentah dapat diolah menjadi hasil produksi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Begitu juga sebaliknya dengan tidak adanya informasi suatu organisasi dapat macet atau mati sama sekali.

5) Mempunyai Tujuan

Organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu setiap organisasi harus mempunyai tujuan-tujuan sendiri. Tujuan organisasi hendaknya dihayati oleh seluruh anggota organisasi sehingga setiap anggotaa

dapat diharapkan mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui partisipasi mereka secara individual.

6) Terstruktur

Organisasi dalam usaha mencapai tujuannya biasanya membuat aturan-aturan, undang-undang dan hierarki hubungan dalam organisasi. Hal ini dinamakan struktur organisasi. Struktur menjadikan organisasi membakukan prosedur kerja dan mengkhususkan tugas yang berhubungan dengan proses produksi. Biasanya suatu organisasi mengembangkan suatu struktur yang membantu organisasi untuk mengontrol dirinya sendiri.

3. Fungsi Organisasi

Organisasi mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah (Muhammad,2014: 32):

- a. Memenuhi kebutuhan pokok organisasi seperti organisasi membutuhkan gedung dan fasilitas lainnya.
- b. Mengembangkan tanggung jawab dan tugas.
- c. Memproduksi barang atau orang misalnya organisasi pendidikan guru produksinya adalah calon-calon guru.
- d. Mempengaruhi dan dipengaruhi orang lain.

F. Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa, dalam struktur organisasi Pemerintah desa, “Kepala desa adalah pemimpin Pemerintah Desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh Bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya”.

Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bukan saja menjalankan Pemerintahan, membina ketertiban dan ketentraman, menjaga supaya hukum yang dilanggar dapat dipulihkan seperti sediakala, tetapi juga agar orang-orang yang melanggar hukum itu tidak mengulangi perbuatannya dan orang-orang yang telah didamaikan benar-benar damai seperti semula.

1. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa adalah kepala organisasi Pemerintahan Desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi Pemerintah berdasarkan asas dokumentasi dan desentralisasi, sedangkan di desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan ini terpusat pada Kepala Desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa atau melalui orang lain.

Menurut Widjaja (2008: 27) “Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya”.

Kepala Desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bamusdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

2. Tugas dan Kewajiban

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban yaitu:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui Bupati dan tembusan Camat.
- b. Membina kehidupan masyarakat desa.
- c. Membina perekonomian desa.
- d. Memlihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, di bantu oleh lembaga adapt desa.
- f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
- g. Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa.

- h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.

G. Alokasi Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Dana desa merupakan salah satu isu krusial dalam Undang-Undang Desa, perhitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Anggaran Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Pembangunan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut, namun mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintahan diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana desa tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 baha Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Anggaran Pendapatan dan Belanja bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

- a. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD).
- b. Anggaran Dana Desa.
- c. Penyisihan pajak dan retribusi daerah.

d. Sumbangan bantuan lainnya dari Kabupaten.

Pembagian Anggaran Dana Desa (ADD) dapat dilihat berdasarkan Variabel Independen Utama dan Variabel Independen Tambahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Asas Merata adalah bagian Anggaran Dana Desa (ADD) yang sama untuk setiap desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal. Alokasi Dana Desa (ADD) Variabel Independen Utama sebesar 70% dan Variabel Independen Tambahan sebesar 30%.
2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap desa. Berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), Variabel Proporsional Utama sebesar 60% dan Variabel Proporsional Tambahan sebesar 40%.

Variabel Independen Utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menemukan nilai bobot desa. Variabel utama ditunjukkan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di desa. Variabel Independen Utama meliputi sebagai berikut:

- a. Indikator Kemiskinan.
- b. Indikator Pendidikan Dasar.
- c. Indikator Kesehatan.
- d. Indikator Keterjangkauan Desa.

Variabel Independen Tambahan merupakan variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah yang meliputi sebagai berikut:

- a. Indikator Jumlah Penduduk
- b. Indikator Luas Wilayah
- c. Indikator Potensi Ekonomi (PBB)
- d. Indikator Jumlah Unit Komunitas (Dusun)

2. Sumber-Sumber Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN, penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan yang dimaksud dengan keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 212 Ayat 1 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan desa yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang

mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Sumber keuangan desa atau pendapatan desa sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 (1), menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
- c. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembangiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa.
- d. Bantuang keuangan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

3. Pengelolaan Dana Desa

Kegiatan pengelolaan APBD yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran. Tujuan pengelolaan anggaran meliputi:

1. Kesejahteraan masyarakat; dengan pengelolaan anggaran yang baik maka akan mendorong kearah perbaikan ekonomi, distribusi pendapatan yang tepat sasaran sehingga akan menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan mengarah kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat.
2. Membuka kesempatan kerja; anggaran dikelola dengan baik dan alokasi anggaran yang tepat terhadap objek-objek vital akan menarik lapangan kerja sehingga ada distribusi anggaran kepada para pekerja sehingga daya beli masyarakat menjadi tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengurangi pengangguran; efektivitas dan efesiensi anggaran dan perubahan alokasi anggaran kepada optimalisasi angkatan kerja dengan berbagai bentuk perluasan lahan pekerjaan yang baru.
4. Pelayanan masyarakat; indikator keberhasilan sebuah pemerintahan adalah bagaimana masyarakat merasa terlayani dengan baik dengan memperoleh tingkat kepuasan yang optimal. Masyarakat merasakan kepuasan maka masyarakat semakin sejahtera.

Dari keempat tujuan pengelolaan anggaran tersebut dapat dilihat adanya kesinambungan dan keselarasan antara tujuan penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dengan pengelolaan anggaran sehingga

dapat diilustrasikan bahwa penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan baik jika ditopang dengan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis.

Dalam pengelolaan Belanja Daerah ada 6 prinsip, yaitu:

1. Kriteria dalam pemilihan program yang akan dilaksanakan dengan yang akan dibiayai dengan pendapatan daerah diupayakan tidak mengandung unsur kegagalan dengan adanya unsur penjaminan. Jaminan keamanan yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan.
2. Jumlah pengeluaran secara total dari semua unit kerja harus mendukung kebijakan makro ekonomi.
3. Arah pengeluaran anggaran antara unit dalam berbagai jenis pengeluaran adalah peningkatan kesejahteraan.
4. Implikasi dari program-program kunci pada kelompok miskin harus dianalisis dengan baik.
5. Alokasi dana untuk belanja rutin dan belanja pembangunan dalam setiap program harus dianalisis dengan terintegrasi.
6. Lembaga yang terlibat di dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran perlu dianalisis.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 dan 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam sebuah sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah

merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terdapat 3 (tiga) pilar tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu:

1. **Tranparansi;** keterbukaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana proporsi pengeluaran pemerintah yang mengarah kepada perbaikan kehidupan masyarakat.
2. **Akuntabilitas;** pertanggungjawaban yang baik dan tepat, kesesuaian penggunaan anggaran dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. **Partisipatif;** sumbangan pemikiran, dukungan yang diberikan secara maksimal dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

H. Nagari Limo Kaum

1. Sejarah Nagari

Nagari Limo Kaum disebut sebagai Nagari yang berdiri lebih awal, karena jauh hari sebelum bernama Nagari Limo Kaum bertempat di Dusun Tuo yang sekarang menjadi salah satu Jorong di Nagari Limo Kaum saat ini, merupakan pusat kekuasaan Datuak Parpatiah Nan Sebatang yang menjadi pucuk pimpinan keselarasan Bodi Caniago. Ditempat ini masih dapat kita lihat saksi bisu dari sebuah ikrar kesepakatan pembagian wilayah antara Datuak Perpatiah Nan Sabatang dengant Datuk Katumangguangan yang menjadi pucuk pimpinan keselarasan Koto

Piliang, yaitu sebuah batu yang berlubang ditengahnya karena ditikan dengan keris atau biasa disebut "Batu Batikam".

Dari Dusun Tuo ini penduduk terus berkembang hingga pada akhirnya terbentuklah kelompok-kelompok yang disebut kaum sampai sebanyak lima rumpun kaum, yaitu :

1. Kaum Tigo Tapian
2. Kaum Balai Labuah
3. Kaum Kubu Rajo
4. Kaum Piliang
5. Kaum Koto Gadih

Dari kesepakatan bersama kelima pimpinan kaum yang telah ada ini makan dibentuklah sebuah Nagari yang diberi nama Nagari Limo Kaum dan saat itu kepemimpinan Nagari telah mulai ada, selanjutnya pada masa penjajahan Belanda awal abad kedelapan belas Masehi dibentuklah Pemerintahan, hal ini dapat dilihat dari sejarah berdirinya Masjid Raya Limo Kaum karena pada waktu itu telah ada "Angku Palo" sebutan untuk Wali Nagari saat itu yang ikut serta bersama-sama dengan masyarakat dalam melaksanakan pembangunannya.

Berdasarkan data yang ada sampai sekarang tercatat telah 19 orang Wali Nagari yang memimpin Nagari Limo Kaum, yaitu :

Kepemimpinan Nagari Limo Kaum

No	Nama/Gelar	Masa Jabatan	
		Dari Tahun	Sampai Tahun
1	Gadang Jari	1840	1848
2	Gadang Kalam	1848	1860
3	I. DT. Rajo Nan Khatib	1860	1875
4	P. Dt. Majo Basa	1875	1905
5	DT. Patiah	1905	1918
6	DT. Majo Basa	1918	1939
10	DT. Paduko Labiah	1958	
11	M. Zen	1959	1963
12	SY. DT. Tan Basa	1966	1968
13	DT. Majo Dirajo		
14	S. DT. Makhudum		
15	Zainahar Naid	1973	1978
16	A. Munaf Ali	1979	1980
17	E. DT. Penghulu Nan Panjang	2001	2009
18	Meriyaldi, S.Sos	2009	2015
19	Gusrial	2015	2017
		2017	Sekarang

Tabel 1.1

2. Peta dan Kondisi Umum Nagari

Nagari Limo Kaum secara geografis berada diantara $00^{\circ} 27'$ Ls dan $100^{\circ}34'$ Bt dengan luas 2.300 Ha serta ketinggian dari permukaan laut ± 400 m. secara administrasi Nagari Limo Kaum berbatasan dengan :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Baringin
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Rambatan
3. Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Cubadak
4. Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Baringin

Dengan jumlah penduduk 13.309 yang terdiri dari 8 jorong, yaitu :

1. Jorong Dusun Tuo
2. Jorong Koto Gadih
3. Jorong Balai Batu
4. Jorong Tigo Tumpuak
5. Jorong Balai Labuah Ateh
6. Jorong Balai Labuah Bawah
7. Jorong Kubu Rajo
8. Jorong Piliang

Secara geografis Nagari Limo Kaum pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah transit, pariwisata, pertanian, pusat bisnis dan pendidikan karena posisi yang sangat strategis.

3. Topografi

Topografi merupakan gambaran tingkat kemiringan dan ketinggian suatu daerah dari permukaan laut. Kondisi ini merupakan salah satu yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah/tanaman sebagaimana terlihat pada table dibawah ini.

Topografi Nagari Limo Kaum

No	Topografi	Kemiringan	Luas (Ha)	%
1	Wilayah datar	-	275	69
2	Wilayah berombak	-	-	
3	Wilayah bergelombang	-	-	
4	Wilayah berbukit	-	125	31
Jumlah		-	±400	100

Tabel 1.2

4. Demografi

Secara teoritis bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar utama dalam pembangunan. Dengan demikian jumlah penduduk yang besar tersebut sangat menentukan arah pembangunan lima tahun kedepan.

Tahun kedepan apabila masyarakat tersebut dapat diberdayakan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, dan sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar ini tidak diberdayakan / dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya akan menjadi beban bagi pemerintah Nagari untuk dimasa yang akan datang.

Berdasarkan data terakhir tahun 2017 ini maka tercatat jumlah penduduk Nagari Limo Kaum adalah sebesar 13.309 jiwa sebagaimana terlihat pada table dibawah ini.

Jumlah Penduduk Nagari Limo Kaum

No	Jorong	Penduduk		
		L	P	Total
1	Dusun Tuo	715	700	1415
2	Koto Gadih	292	285	577
3	Balai Batu	385	400	785
4	Tigo Tumpuak	294	303	587
5	Balai Labuah Ateh	415	438	853
6	Balai Labuah Bawah	695	717	1412
7	Kubu Rajo	2422	2460	4882
8	Piliang	1407	1381	2788
Jumlah				13309

Tabel 1.3

5. Penyelenggaraan Koordinasi

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan optimalisasi jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat melalui koordinasi sesuai dengan kebutuhan, perkembangan dan pertimbangan masalah. Sebagaimana tahun

sebelumnya koordinasi dengan pimpinan BPRN dan pimpinan dengan lembaga-lembaga Nagari berjalan dengan baik.

Koordinasi ini dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan. Fenomena ini tecermin melalui kegiatan-kegiatan keNagarian. Rapat koordinasi terutama membahas persoalan-persoalan actual yang terjadi di Nagari meliputi masalah Ekonomi, Aset Nagari, Kependudukan, Sosial Budaya dan Keamanan Ketertiban. Rumusan atau solusi yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut menjadi pendoman dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya.

Sesuai kegiatan-kegiatan koordinasi semakin dikembangkan ketinggian kecamatan dan kabupaten, dengan dilaksanakannya rapat koordinasi yang dihadiri oleh Kepala Dinas dan Instansi yang ada di Tanah Datar, Camat Lima Kaum, Wali Nagari, Pimpinan BPRN, Pimpinan KAN dan Pimpinan Lembaga-Lembaga Nagari Limo Kaum lainnya. Hal ini beertujuan untuk langkah awal guna mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, pendidikan, pembangunan dan keamanan lingkungan.

6. Kelembagaan Nagari

Lembaga-lembaga yang ada di Nagari Limo Kaum BPRN, KAN, PKK, Lembaga Unsur Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, Pemuda, LPM, FKPM, dan Lembaga Kemsyarakatan lainnya sudah berjalan dengan baik dan lacar sehingga telah dapat membantu melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan di Nagari Limo Kaum, adapun struktur dari lembaga tersebut adalah sebagai berikut :

Struktur Pemerintahan Nagari Limo Kaum

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Gusral	Wali Nagari	SLTA
2	Suhendra, SE	Sekretaris Nagari	S1
3	Maida	Kaur Pemerintahan	SLTA
4	Novi Irwanto A,Md.Kom	Kaur Pembangunan	D.III
5	Matinis	Kaur Umum	SLTA
6	Nola Novita Sari	Kaur Perekonomian	SLTA
7	Andi Yalto, SE	Kaur Kemsyarakat	S1
8	Mardianis, A,Md	Bendahara Nagari	D3
9	Nova Syafitri	Operator Komputer	SLTA
10	Putri Hanyatun Nufus	Operator Komputer	SLTA
11	Tia Kartika	Tenaga K3	SLTA

Tabel 1.4

7. Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN)

BPRN yang merupakan komponen Pemerintahan Nagari, senantiasa mengupayakan terciptanya suasana yang kondusif guna mendukung terlaksanakannya pembangunan dan pengembangan Nagari dengan baik, serta merangsang tumbuh dan berkembangnya kreasi peran serta masyarakat yang sehat dan dinamis dalam pembangunan Nagari.

BPRN telah menunjukkan kinerja yang baik disamping mampu menjembatani pihak eksekutif masyarakat dan memberikan pengertian serta penjelasan program nagari.

Jumlah keanggotaan BPRN Nagari Limo Kaum yakni 9 orang, adapun kelengkapan yakni :

1. Ketua BPRN
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota 6 orang

8. Pemuda dan Olahraga

Pemuda merupakan pelopor perubahan dan penggerak pembangunan. Pengaruh atas ketangguhan dan kecakapan pemuda berpartisipasi dalam pergerakan pertumbuhan pembangunan bangsa sangat menentukan apakah bangsa tersebut mengalami kemajuan atau kemunduran. Beberapa hal yang mampi menjadi perekat dalam pembinaan hubungan yang kuar dikalangan pemuda adalah sikap sportifitas melalio kemampuan berorganisasi dan olahraga. Dengan organisasi mereka mampu menjadi manusia produktif dan mandiri, sedangkan dengan olahraga mampu meningkatkan rasa persatuan dan kerja sama diantara mereka sehingga terwujudnya generasi yang berproduktif sehat jasmani dan rohani.

Dalam kegiatan berorganisasi pemuda yang ada di Nagari Limo Kaum saat ini masih tersentrlisasi pada masing-masing Jorong. Untuk tingkat Nagari kesatuan

pemuda Nagari belum dapat terorganisir dengan baik, dan ini merupakan aset besar bagi pembangunan Nagari.

9. Masalah-Masalah yang Dihadapi Nagari dalam Perencanaan Pembangunan Nagari

Masyarakat dewasa ini semakin kritis kepada pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Masyarakat tidak akan ragu lagi untuk menyuarakan aspirasinya jika program pembangunan tidak selaras dengan kepentingannya. Hal ini semakin didukung dengan iklim yang kondusif dalam system menyampaikan aspirasi, oleh karena itu Pemerintah Nagari harus peka dan responsif dalam menjalankan roda pembangunan. Kondisi ini haruslah dimulai dari fungsi perencanaan pembangunan Nagari, perencanaan pembangunan sebagai titik tolak pembangunan harus mencakup berbagai aspirasi stakeholders Pemerintahan Nagari Limo Kaum.

Adapun masalah yang timbul :

1. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Nagari.
2. Kurang terkoordinir antara lembaga di Pemerintahan Nagari dalam perencanaan pembangunan Nagari.
3. Terbatasnya tenaga perencana yang profesional dalam fungsi perencanaan pembangunan Nagari.

10. Pengelolaan Keuangan Nagari Serta Kerangka Pendanaan

Pengelolaan Keuangan Nagari merupakan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Nagari. Pelaksanaan pembangunan suatu Nagari sangat dipengaruhi oleh ketersediaan Anggaran Pemerintah Nagari, untuk kelancaran proses pembangunan tersebut.

Ketersediaan Anggaran Pemerintah Nagari merupakan salah satu faktor yang sangat strategis untuk mencapai atau mewujudkan Visi, Misi tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Nagari, disamping faktor sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada di Nagari sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Anggaran Pendapatan Belanja Nagari secara matang dan jelas setiap tahun Anggaran.

1. Pengelolaan Keuangan Nagari Limo Kaum berpedoman pada :
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, tambahan lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

13. Penerimaan Nagari

Merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa sumber-sumber Penerimaan Desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, Transfer dan Pendapatan lain-lain. Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya partisipasi, gotong-royong dan lain-lain. Dana Transfer terdiri dari Dana Desa, Hasil Pajak

Kabupaten dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan APBD Kabupaten. Pendapatan lain-lain terdiri dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Daftar Penerimaan Nagari Tahun 2017

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan	-
	a. Pendapatan Asli Nagari	-
	b. Dana DAUN	-
	c. Dana Transfer	-
	- AND	1.219.403.000,-
	- APBD	887.985.000,-
	- DBH dan Retribusi Daerah	34.641.800,-
	- DAK Provinsi	-
	- DAK Kabupaten	1.090.000.000,-
	Jumlah	3.232.029.800,-

Tabel 1.5

14. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan Keuangan Nagari mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda Pemerintahan, oleh karena itu Pengelolaan Keuangan Nagari selalu berkembang sesuai dengan tuntutan publik menginginkan Pengelolaan

Keuangan Nagari semakin transparan dan akuntabel, untuk itu Pengelolaan Keuangan disesuaikan dengan perkembangan program-program Pemerintah Nagari yang sudah ditetapkan menjadi Prioritas dalam Pembangunan Nagari.

15. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi secara umum dapat diartikan sebagai langkah-langkah terencana untuk mencapai serangkaian tujuan atau cita-cita yang telah dirumuskan, yang berisikan indikasi program perencanaan pembangunan Nagari. Arah kebijakan dapat diartikan sebagai pedoman yang member arah dan batasan dalam merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan cita-cita.

Dengan demikian, strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan yang menggambarkan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan Nagari dengan lebih efektif dan efisien, dalam hal ini adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Nagari. Kebijakan yang akan ditempuh dalam pencapaian pembangunan Nagari Limo Kaum periode 2018 s/d 2023 adalah :

Strategi Misi 1 : Menumbuhkembangkan nilai-nilai agama dan adat dengan membangun semangat kembali ke surau

- a. Melakukan pembinaan kegiatan keagamaan
- b. Melakukan pembinaan remaja dan pemuda
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan kelompok agama
- d. Melakukan pembinaan sosial dan budaya

Arah kebijakan :

- a. Mengalokasikan dana untuk kegiatan keagamaan
- b. Menggiatkan kegiatan Remaja Masjid
- c. Peningkatan kapasitas SDM pelaku keagamaan
- d. Melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pelestarian adat istiadat dan budaya

Strategi Misi 2 : Memberdayakan seluruh potensi dalam menggerakkan pembangunan Nagari dari segala bidang

- a. Mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan
- b. Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat perantau
- c. Melakukan pembangunan berdasarkan skala prioritas

Arah kebijakan :

- a. Memenuhi kebutuhan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur pelayanan dasar masyarakat nagari
- b. Menggerakkan seluruh potensi ekonomi nagari
- c. Mengutamakan pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan prinsip swakelola

Strategi Misi 3 : melaksanakan tata kehidupan bermasyarakat sesuai dengan ketentuan adat salingka Nagari

- a. Melakukan perencanaan nagari dengan menghormati hak asal usul yang berlaku di nagari
- b. Menegakkan ketentuan adat salingka nagari

Arah kebijakan :

- a. Membuat peraturan bersama lembaga adat dalam rangka penataan kehidupan masyarakat
- b. Memfungsikan kembali perangkat adat dalam penataan kehidupan masyarakat

Strategi Misi 4 : Menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum adat

- a. Memberdayakan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan
- b. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum Negara dan hukum adat bagi masyarakat

Arah kebijakan :

- a. Membentuk kelompok-kelompok masyarakat sadar hukum
- b. Melakukan pelatihan adat bagi generasi muda

Strategi Misi 5 : melaksanakan sepenuhnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

- a. Melakukan pelatihan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan BPRN
- b. Menyebarluaskan informasi tentang nagari kepada masyarakat

Arah kebijakan :

- a. Peningkatan kapasitas Wali Nagari, Perangkat Nagari dan BPRN
- b. Peningkatan peranserta masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan nagari

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Rachmat Kriyantono, Ph.D (2006:196), data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi. Riset kualitatif adalah riset yang menggunakan cara berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari hal-hal khusus (fakta empiris) menuju hal-hal umum.

Berdasarkan metodologi kualitatif dikenal beberapa metode riset antara lain (Kriyantono, 2006: 62):

1. Metode Focus Group Discussion

Metode Focus Group Discussion atau FGD (kelompok diskusi terfokus) adalah model riset di mana periset memilih orang-orang yang dianggap mewakili sejumlah publik atau populasi yang berbeda. FGD memungkinkan periset mendapatkan data yang lengkap dari responden yang biasanya dijadikan landasan suatu program. Pelaksanaan FGD juga relatif cepat, yang terlama adalah waktu rekrutmen responden. FGD juga memungkinkan periset lebih fleksibel dalam menentukan desain pertanyaan, sehingga bebas bertanya kepada responden sesuai tujuan riset.

2. Metode Wawancara Mendalam

Metode wawancara mendalam adalah metode riset di mana periset melakukan kegiatan wawancara tatap muka secara mendalam dan terus-menerus untuk menggali informasi dari responden.

3. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode di mana periset mengamati langsung objek yang diteliti. Observasi sering dipadukan dengan wawancara mendalam. Sering demi keberhasilannya, periset rela mengorbankan kehidupannya demi ilmunya.

4. Metode Studi Kasus

Studi kasus adalah metode riset yang menggunakan berbagai sumberdata (sebanyak mungkin data) yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis.

5. Metode Etnografi

Yaitu riset yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana individu-individu menggunakan budayanya untuk memaknai realitas. Riset ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan kebudayaan tertentu secara mendalam dari berbagai aspek seperti artefak budaya, pengalaman hidup, kepercayaan, dan sistem nilai dari suatu masyarakat. Periset melakukan wawancara mendalam, mengobservasi pelaku, menelusuri dokumen, dan artefak budaya serta menggelar diskusi kelompok.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Peneliti kualitatif biasanya memanfaatkan metode wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. (Moleong,2006: 5)

B. Narasumber

Narasumber merupakan sumber rujukan dari tema yang dibahas oleh peneliti. Yang menjadi narasumber ialah:

1. Bapak Gusrial selaku Wali Nagari Limo Kaum
2. Bapak Altri selaku Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Limo Kaum
3. Bapak Risman selaku Ketua Tokoh Pemuda Nagari Limo Kaum

C. Kerangka Konsep

Penentuan kerangka konseptual oleh peneliti akan sangat membantu dalam menentukan arah pelaksanaan penelitian. Kerangka konseptual merupakan kerangka pikir mengenai hubungan antar variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian atau hubungan antar konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada studi kepustakaan.

Terkadang kebiasaan penggunaan teori dalam penelitian kualitatif ikut memengaruhi pendekatan penelitian kualitatif. Padahal penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induktif. Dengan demikian, teori sesungguhnya adalah alat yang akan diuji kemudian dengan dan instrument penelitiannya. Kebiasaan dan

pengaruh itu terkadang membantu stereotip teoretis terhadap penelitian kualitatif yaitu deskriptif kualitatif, di mana sesungguhnya tipe penelitian ini belum “benar-benar” kualitatif atau masih banyak dipengaruhi oleh pandangan-pandangan deduktif kualitatif. (Bungin,2008: 27)

Konsep Teoritis	Konsep Operasional
Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Pemanfaatan Dana Alokasi Nagari (di Nagari Limo Kaum Sumatera Barat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kredibilitas 2. Keterampilan berkomunikasi 3. Kepribadian 4. Transparansi 5. Akuntabilitas 6. Partisipatif

Tabel 1.6

D. Definisi Konsep

Definisi konsep adalah penjabaran lebih lanjut mengenai konsep yang telah diklarifikasi ke dalam bentuk variabel yang akan diteliti. Definisi konsep operasional dan Strategi komunikasi pembangunan dalam pemanfaatan dana alokasi nagari (di Nagari Limo Kaum Sumatera Barat) adalah:

1. Kredibilitas, yaitu seorang Wali Nagari yang merupakan seorang pemimpin harus berkualitas agar menimbulkan rasa kepercayaan pada masyarakat.

2. Keterampilan berkomunikasi, yaitu seorang Wali Nagari harus mampu menggunakan komunikasi kepada masyarakat baik secara verbal maupun non verbal.
3. Kepribadian, yaitu cara Wali Nagari bereaksi dan berinteraksi dengan masyarakat yang dideskripsikan melalui sifat dan sikap.
4. Transparansi, yaitu dana desa harus terbuka kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan.
5. Akuntabilitas, yaitu Wali Nagari harus bertanggung jawab terhadap dana desa yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
6. Partisipatif, yaitu partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan pikiran dan tenaga untuk pembangunan desa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan Wali Nagari, Ketua Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) dan Ketua Tokoh Pemuda Nagari Limo Kaum Sumatera Barat dalam pemanfaatan Dana Alokasi Nagari yaitu:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan yang dimaksud oleh peneliti ialah melakukan penelitian langsung di lokasi yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data studi lapangan ditempuh dengan cara melakukan dokumentasi yang bertujuan melengkapi teknik wawancara mendalam.

b. Data Primer

Data yang langsung di peroleh dari ojeknya. Tentang masalah-masalah yang akan diteliti, dengan melakukan wawancara dengan Wali Nagari, Bendahara Nagari, Ketua Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) dan Ketua Tokoh Pemuda Nagari Limo Kaum Sumatera Barat.

F. Teknik Analisis Data

Data terkumpul akan dianalisa dengan seksama menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori tersebut. Dapat ditarik beberapa hal yang akan dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah cara yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Penelitian kualitatif ialah penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta lebih menonjolkan proses dan makna. Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.

Riset penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam (*Depth interviews*) yang didalamnya terdapat kegiatan wawancara tatap muka secara terus-menerus untuk menggali informasi dari responden.

G. Deskripsi Lokasi Penelitian

Nagari Limo Kaum yang berada di Provinsi Sumatera Barat disebut sebagai Nagari yang berdiri lebih awal, karena jauh hari sebelum bernama Nagari Limo

Kaum bertempat di Dusun Tuo yang sekarang menjadi salah satu Jorong di Nagari Limo Kaum saat ini, merupakan pusat kekuasaan Datuak Parpatiah Nan Sebatang yang menjadi pucuk pimpinan keselarasan Bodi Caniago. Di tempat ini masih dapat kita lihat saksi bisu dari sebuah ikrar kesepakatan pembagian wilayah antara Datuak Parpatiah Nan Sabatang dengan Datuk Katumangguangan yang menjadi pucuk pimpinan keselarasan Koto Piliang, yaitu sebuah batu yang berlubang ditengahnya karena ditikan dengan keris atau biasa disebut "Batu Batikam".

Dari Dusun Tuo ini penduduk terus berkembang hingga pada akhirnya terbentuklah kelompok-kelompok yang disebut kaum sampai sebanyak lima rumpun kaum, yaitu :

6. Kaum Tigo Tapian
7. Kaum Balai Labuah
8. Kaum Kubu Rajo
9. Kaum Piliang
10. Kaum Koto Gadih

Dari kesepakatan bersama kelima pimpinan kaum yang telah ada ini maka dibentuklah sebuah Nagari yang diberi nama Nagari Limo Kaum dan saat itu kepemimpinan Nagari telah mulai ada, selanjutnya pada masa penjajahan Belanda awal abad kedelapan belas Masehi dibentuklah Pemerintahan, hal ini dapat dilihat dari sejarah berdirinya Masjid Raya Limo Kaum karena pada waktu itu telah ada "Angku Palo" sebutan untuk Wali Nagari saat itu yang ikut serta bersama-sama dengan masyarakat dalam melaksanakan pembangunannya.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Wawancara 1

Nama : Bapak Gusrial

Jabatan : Wali Nagari Limo Kaum

Peneliti: Bagaimana strategi komunikasi bapak kepada masyarakat jika ingin membangun sesuatu untuk Nagari Limo Kaum?

Informan: Dalam pelaksanaan kegiatan, kami membentuk sesuai ketentuan. Saya Wali Nagari membentuk pelaksanaan teknis tim pengelola keuangan, kemudian untuk pelaksanaan di lapangan membentuk tim kreatif pengelola kegiatan (TPK). Untuk mengelola kegiatan ini, komunikasi yang dilakukan adalah melakukan musyawarah di lokasi kegiatan yang akan kami laksanakan. Pembentukannya dilaksanakan secara musyawarah. Dan ketika musyawarah pembentukan TPK, kami pihak Nagari menyampaikan semuanya, menjelaskan sumber dana, teknis pelaksanaan dan tanggung jawab apa saja yang harus dilakukan tim TPK dan masyarakat. Jadi salah satu cara komunikasi kami adalah dengan cara bermusyawarah, dan saat di lapangan kami juga membuat semacam plang kegiatan. Cara bermusyawarahnya adalah dengan cara mengundang menggunakan surat undangan dan mengumumkan sesuai dengan wilayah Jorong. Kalau wilayah Jorongnya terpencil, kami undang secara terbuka, artinya melalui

pemberitahuan ditempel di warung-warung. Dan sekiranya wilayah Jorongnya luas, maka kami membuat surat undangan untuk tokoh masyarakat, artinya perwakilan-perwakilan masyarakat walaupun nanti hadir atau tidaknya adalah hak mereka.

Peneliti: Bagaimana Program Kerja Nagari yang telah dilaksanakan pada tahun 2017?

Informan: Setiap program kerja kami yang sesuai perundang-undangan ada semacam tahapan atau proses yang harus dilewati, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), penyusunan RPJM dan penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Nagari. RKP inilah yang kita jadikan dasar untuk melaksanakan program kerja Nagari Limo Kaum dalam satu tahun berjalan. Dan disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah kami susun tim penyusunnya.

Peneliti: Berasal dari mana sajakah dana desa di Nagari Limo Kaum ini?

Informan: Ada beberapa sumber pendapatan kami di nagari. Yang pertama dana asli dari Nagarinya. Yang Kedua ada dana transfer, dana transfer ini ada beberapa macam yaitu yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Nagari, dana bantuan keuangan bersifat khusus, dan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peneliti: Bagaimana cara bapak menggunakan dana desa untuk kepentingan masyarakat?

Informan: Dalam penggunaan dana nagari untuk kepentingan masyarakat ada proses penetapan yang harus dilewati, sehingga dalam satu tahun berjalan itu yang kami laksanakan adalah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan atau skala prioritas yang telah ditetapkan bersama dalam musyawarah nagarinya. Pada tahun 2014 dana desa yang hanya bersumber dari dana asli Nagari sangat-sangat kecil untuk masyarakat. Tetapi hari ini dengan adanya bantuan keuangan bersifat khusus membuat masyarakat sangat terbantu. Tahun 2017 kami mendapatkan bantuan keuangan bersifat khusus yang merupakan dana pokok-pokok pikiran dari anggota dewan dan dana pokok pikiran yang di arahkan eksekutif oleh pimpinan daerah yaitu sebesar Rp.1.090.000.000,-. Inshaallah pada tahun ini dana-dana bantuan bersifat khusus direncanakan mencapai hampir Rp.2.900.000.000,-. Tentunya ini sangat dibutuhkan sekali oleh Nagari dan dapat lebih memajukan lagi Nagari ini. Dan kami juga melakukan pengeloaan keuangan, pelaksanaan kegiatan dengan maksimal, sehingga dana yang ada benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan dapat dikerjakan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Peneliti: Bagaimana perkembangan Nagari 10 tahun ke belakang dari tahun ke tahun?

Informan: 10 tahun ke belakang ini terjadi peningkatan-peningkatan di Nagari secara bermasyarakat yaitu ketika rasa memiliki dan kebersamaan

tumbuh di Nagari Limo Kaum. Pembangunan dilakukan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Awalnya dulu Nagari Limo Kaum ini sering terkendala dengan dana pembangunan, maka dari itu perkembangan Nagari pun sedikit lambat. Namun semenjak adanya beberapa program-program Pemerintah, baik dari zaman Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang bermanfaat sangat besar bagi masyarakat dan akhirnya terjadi peningkatan sampai hari ini. Ketika program Bapak Jokowi dengan dana desa masing-masing desa mendapat dana sesuai aturan yang berlaku ini juga sangat dirasakan manfaatnya. Kemajuan Nagari hari ini sangat-sangat jauh berbeda dibandingkan dengan 10 tahun ke belakang.

B. Wawancara 2

Nama : Bapak Risman

Jabatan : Ketua Tokoh Pemdua Limo Kaum

Peneliti: Apakah Bapak merasakan hasil dari pembangunan tersebut dan menurut Bapak seberapa pentingkah pembangunan itu dilakukan?

Inorman: Pembangunan pada tahun 2017 merupakan transisi peralihan, jadi bisa dikatakan kurang maksimal. Tetapi tahun 2018 ini merupakan proses berjalan. Banyaknya Sisa lebih perhitungan anggaran

(SILPA) Nagari Limo Kaum karena pengaruh transisi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecukupan kebutuhan masyarakat. Saat ini tergantung Undang-Undang Desa dengan Anggaran Dana Desa (ADD) dan tergantung bagaimana Wali Nagari mengelola dana yang ada. Jadi di Nagari Limo Kaum yang terdapat 8 Jorong ini secara fisik sudah bisa dikatakan maksimal dan merata.

Peneliti: Apakah Pak Wali Nagari ikut serta dalam proses pembangunan?

Informan: Iya, Bapak Wali Nagari selalu bertanggung jawab dalam proses pembangunan. Tingkat awal pembangunan adalah Pra Musrenbang yaitu Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan di tingkat Jorong. Usulan-usulan pembangunan dari Jorong dibawa ke Nagari kemudian Nagari menampung dan dilanjutkan ke tingkat Kecamatan. Sampai saat ini sudah tidak ada jalan yang rusak, seminimalnya jalan tersebut dicor bahkan sampai jalan untuk ke persawahan. Jadi jika terkait kegiatan sarana dan prasarana secara fisik sudah 90% di nikmati oleh masyarakat Nagari.

C. Wawancara 3

Nama : Bapak Altri

Jabatan : Ketua Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) Limo Kaum

Peneliti: Bagaimana menurut Bapak mengenai program kerja Bapak Wali Nagari?

Informan: Berbicara tentang program Wali Nagari, dalam proses pembangunan bukan hanya Bapak Wali Nagari saja yang menentukan tetapi aspirasi masyarakat juga ditampung, karena Pra Musrenbang tingkat bawah (Jorong) merupakan wilayah terkecil dari Pemerintahan. Yang yang hadir disana adalah seluruh elemen yang meliputi tokoh-tokoh masyarakat, diantaranya Unsur Pemuda, Ninik Mamak, Alim Ulama, Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN), dan yang lainnya. Merekalah yang berdiskusi tentang apa yang menjadi kebutuhan untuk Nagari sedangkan peran Bapak Wali Nagari adalah memfasilitasinya. Kemudian 8 Jorong yang ada di Nagari Limo Kaum akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Nagari. Di Nagari dilakukan musyawarah yang disebut Musrenbang Nagari. Dalam Musrenbang itu membahas mengenai usulan-usulan yang dibicarakan ditingkat Jorong sebelumnya, didiskusikan dan kemudian dilihat dari tingkat kelayakan dan kebutuhannya yang akhirnya nanti akan masuk usulan tersebut ke dalam daftar pembangunan prioritas Nagari. Di dalam musyawarah tersebut

terjadi diskusi yang sangat intens antara satu Kepala Jorong dengan Kepala Jorong yang lain, tidak ada ego-ego yang terjadi. Disanalah peran Bapak Wali Nagari untuk mengatur lalu lintas diskusi dan mencermati isi dari musyawarah tersebut kemudian mengambil beberapa usulan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Nagari dan akan dijadikan keputusan prioritas pembangunan.

Peneliti: Apa saja pembangunan yang telah dilakukan Bapak Wali Nagari yang sangat bermanfaat bagi masyarakat?

Informan: Pembangunan yang sangat bermanfaat yang telah dilakukan salah satunya adalah pembangunan lapangan bola kaki, gunanya bukan hanya sekedar lapangan bola kaki saja tetapi mempunyai banyak fungsi yaitu bisa sebagai tempat olahraga anak Nagari, acara keagamaan misalnya wirid-wirid pengajian dan tabligh akbar, kegiatan sosial dan masih banyak lagi. Intinya seluruh kegiatan bisa dilaksanakan tidak terlepas dari bagaimana komunikasi pimpinan Pemerintahan, pimpinan adat, pimpinan agama, para pemuda dan kaum ibu (Ninik Mamak).

Peneliti: Bagaimana menurut Bapak mengenai Nagari Limo Kaum saat ini?

Informan: Nagari Limo Kaum menjadi Nagari terbaik Nasional pada tahun 2014 sampai dengan sekarang. Kendala Nagari ini adalah mempertahankan “Nagari Terbaik Nasional” yang cukup sulit. Namun juga ada kebanggaan yang dirasakan yaitu banyaknya kunjungan tamu dari Provinsi lain yang melakukan studi banding ke

Nagari Limo Kaum ini dari berbagai macam daerah diantaranya Asahan, Tanjung Balai, Sibolga, Kerinci, dan lain-lain. Sumber Daya Manusia (SDM) di Nagari ini cukup maju dan bagus, sehingga sampai saat ini tidak ada masalah yang terjadi di Nagari. Kemajuan Nagari sangat tergantung dari kepemimpinan seorang Wali Nagari. Wali Nagari saat ini yaitu Bapak Gusrial yang dulunya merupakan Sekretaris Nagari dan Unsur Pemuda, maka dari itu Bapak Wali Nagari sudah sangat paham tentang wilayah Nagarinya. Bapak Wali Nagari juga memiliki kepribadiannya yang bagus yaitu mau menerima setiap masukan, kritik dan saran dari masyarakat, jika ada yang ragu dia kumpulkan kembali masyarakat dan kembali mendiskusikannya untuk mendapatkan jalan keluar dengan keputusan bersama.

D. Hasil Pembahasan

Pada awalnya, dulu Nagari Limo Kaum berkembang sedikit lambat karena terkendala dengan dana yang kurang mencukupi. Namun semenjak adanya beberapa program-program Pemerintah, baik dari zaman Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Hingga sampai saat ini yaitu program Bapak Jokowi memberikan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku dan akhirnya terjadi peningkatan yang sangat jauh berbeda dibandingkan dengan Nagari Limo Kaum sebelumnya.

Strategi dari Wali Nagari kepada masyarakat dalam pemanfaatan Dana Alokasi Nagari yaitu dengan cara melakukan musyawarah dan membentuk tim Teknis Pengelola Keuangan (TPK) yang bertujuan untuk mengelola kegiatan pembangunan. Pada saat musyawarah, pihak Nagari menjelaskan semuanya tentang dana yang ada secara terbuka. Wali Nagari beserta tim Nagari bermusyawarah dengan perwakilan-perwakilan masyarakat diantaranya yaitu Unsur Pemuda, Ninik Mamak, Alim Ulama, Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) dan lain-lain. Cara bermusyawarahnya adalah dengan cara mengundang menggunakan surat undangan dan mengumumkan sesuai dengan wilayah Jorong. Apabila wilayah Jorongnya terpencil di undang secara terbuka, artinya melalui pemberitahuan yang ditempel di warung-warung. Tetapi apabila wilayah Jorongnya luas, maka pihak Wali Nagari membuat undangan untuk perwakilan tokoh-tokoh masyarakat, artinya perwakilan-perwakilan masyarakat.

Program kerja yang dilakukan Bapak Wali Nagari yaitu sesuai dengan perundang-undangan yang ada diantaranya yaitu mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dan RKP inilah yang dijadikan dasar untuk melaksanakan program kerja Nagari Limo Kaum dalam satu tahun berjalan yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dalam proses pembangunan bukan hanya Bapak Wali Nagari saja yang menentukan tetapi aspirasi masyarakat juga ditampung, masyarakat yang dimaksud terdiri dari perwakilan tokoh-tokoh masyarakat dari 8 Jorong yang ada di Nagari

Limo Kaum. Merekalah yang berdiskusi tentang apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sedangkan peran Bapak Wali Nagari adalah memfasilitasi. Kemudian usulan-usulan dari masyarakat tersebut dibawa ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Nagari. Di Nagari dilakukan musyawarah yang disebut Musrenbang Nagari. Usulan-usulan tersebut didiskusikan dalam Musrenbang dan kemudian dilihat tingkat kelayakan dan kebutuhannya yang akhirnya usulan tersebut masuk ke dalam daftar pembangunan prioritas Nagari.

Terdapat beberapa sumber pendapatan dana yang didapat oleh Nagari Limo Kaum yaitu yang pertama dana asli dari Nagari, yang kedua dana transfer diantaranya yaitu bersumber dari Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Nagari, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten. Jumlah dana yang didapat pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 3.266.777.600,- dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)
Dana Transfer	3.266.777.600,-	3.232.029.800,-	34.747.800,-
Dana Nagari	887.985.000,-	887.985.000,-	0,-
Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	57.389.600,-	34.641.800,-	22.747.800,-

Alokasi Dana Nagari (ADN)	1.219.403.000,-	1.219.403.000,-	0,-
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	12.000.000,-	0,-	12.000.000,-
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	1.090.000.000,-	1.090.000.000,-	0,-
JUMLAH PENDAPATAN	3.266.777.600,-	3.232.029.800,-	34.747.800,-

Tabel 1.7

Dana Nagari tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat Nagari, namun juga terdapat proses penetapan yang dilewati, sehingga yang dilaksanakan dalam satu tahun berjalan adalah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan atau skala prioritas yang telah ditetapkan bersama dalam musyawarah yang telah dilakukan. Dana yang ada di kelola dengan sangat teliti dan pada saat pelaksanaan kegiatan juga dilakukan secara maksimal sehingga dana yang ada benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Nagari Limo Kaum yang memiliki 8 Jorong saat ini secara fisik sudah merata dalam pembangunannya. Tidak ada lagi jalan yang rusak, karena seminimal mungkin jalan yang rusak tersebut dicor bahkan sampai jalan untuk ke persawahan. Jadi jika terkait kegiatan pembangunan, sarana dan prasarana secara fisik sudah 90% elah dinikmati oleh masyarakat Nagari.

Dapat diketahui bahwa strategi komunikasi yang dilakukan Wali Nagari dalam pemanfaatan Dana Alokasi Nagari (DAN) adalah menggunakan komunikasi

interpersonal yaitu komunikasi langsung (tatap muka) kepada masyarakat dengan menerima seluruh usulan-usulan masyarakat yang kemudian di tampung kembali oleh Nagari dan diambil beberapa usulan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan akan dimasukkan ke dalam daftar prioritas pembangunan Nagari Limo Kaum.

Pencapaian Nagari terbaik Se-Provinsi pada tahun 2013 dan Nasional pada tahun 2014 tentunya merupakan hasil dari kerja keras Wali Nagari beserta tim Nagari dan masyarakat. Maka dari itu seorang Wali Nagari juga dituntut untuk bisa menjadi mediator, kreator, konseptor sekaligus komunikator, karenanya Wali Nagari harus dapat mengoptimalkan dan memanfaatkan dana yang ada dengan sebaik mungkin yang bertujuan untuk mengembangkan Nagari dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, serta hasil analisis data maka kesimpulan dari penelitian yang berjudul Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Pemanfaatan Dana Alokasi Nagari (di Nagari Limo Kaum Sumatera Barat) adalah sebagai berikut:

1. Strategi komunikasi yang digunakan Wali Nagari Limo Kaum dalam pemanfaatan dana alokasi nagari adalah dengan menggunakan komunikasi interpersonal yaitu komunikasi langsung (tatap muka) kepada masyarakat dengan memberikan penjelasan yang sangat terbuka mengenai dana desa yang diperoleh oleh desa. Hal itu dilakukan agar masyarakat tidak salah sangka atau salah menilai mengenai kinerja Wali Nagari dan Tim Nagari.
2. Strategi yang dilakukan Wali Nagari apabila masyarakat ingin mengajukan sebuah permintaan yang berkaitan untuk mengembangkan Nagari Limo Kaum yaitu dengan mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh banyak pihak, diantaranya adalah BPRN Limo Kaum, Lembaga Unsur, Kepala Jorong, Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan Tokoh-tokoh lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian, penulis ingin memberikan saran antara lain:

1. Semua kebutuhan Nagari sudah hampir terpenuhi kecuali di bidang, kecuali di bidang pendidikan, ekonomi dan kesenian. Penulis berharap agar ketiga bidang tersebut lebih ditingkatkan dan dikembangkan lagi agar hidup masyarakat di Nagari Limo Kaum menjadi lebih sejahtera.
2. Penulis berharap Bapak Wali Nagari untuk memberikan informasi atas segala bentuk dokumen Dana Alokasi Nagari (DAN) kepada masyarakat, agar meminimalkan terjadinya kecurangan dan kesalahpahaman masyarakat dalam pengeolaan Dana Nagari.
3. Penulis berharap untuk dibentuk badan pengawas independen keuangan Dana Alokasi Nagari, agar dalam pelaksanaan pembangunan lebih baik dan dapat menghindari penyalahgunaan pengelolaan dana oleh pihak pelaksana pengelola dana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2014. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- AW, Suranto. 2011. *Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Bungin, Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Harun, Rochajat H. dan Elvirano Ardianto. 2012. *Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial: Perspektif DOrninan, Kaji Ulang, dan Teori Kritis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta : Kencana Prenada Group
- Liliweri, Alo. 2011. *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Moloeng, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. 2007. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Grafindo Persada
- Muhammad, Arni Dr. 2014. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Nasution, Zulkarimen. 2002. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Nurjaman, Kadar dan Khaerul Umam. 2012. *Komunikasi dan Public Relation*.

Bandung : Pustaka Setia

Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Widjaja, Prof. Drs. H.A.W. 2000. *Ilmu Komunikasi, Pengantar Studi*. Jakarta :

Rineka Cipta

Wood, T. Julia. 2008. *Komunikasi Interpersonal, Interaksi Keseharian*. Jakarta :

Salemba Humanika

Sumber lain :

<http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-nagari-menurut-para-ahli-lengkap/>

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Limo_Kaum_Lima_Kaum_Tanah_Datar

<http://ekoqren.blogspot.co.id/2013/02/tugas-pokok-dan-fungsi-kepala-desa-dan.html?m=1>

**FOTO-FOTO DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA DENGAN WALI
NAGARI LIMO KAUM SUMATERA BARAT**



**FOTO-FOTO DOKUMENTASI HASIL PEMANFAATAN DANA NAGARI
DI NAGARI LIMO KAUM SUMATERA BARAT**



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Fidy Rizky Amalia
Tempat / Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 04 Mei 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Mustafa Gg Buntu No. 18 Glugur Darat I
Kecamatan Medan Timur, Medan, Sumatera Utara
No. Telp/HP : 082276791843

Menerangkan dengan sesungguhnya :

PENDIDIKAN FORMAL

- 2001 – 2002 : Taman Kanak-Kanak Jonaha Pematang Siantar
- 2003 – 2008 : SD Negeri 005 Ujungbatu
- 2008 – 2011 : MTs Negeri Tandun Ujungbatu
- 2011 – 2014 : SMA TNegeri 1 Ujungbatu
- 2014 – 2018 : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Public Relations, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian daftar riwayat hidup saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Peneliti,

Fidy Rizky Amalia



Perpetua
ni agar disebulkan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

pada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan
SIP UMSU

Medan, 24 November 2017.

dan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMSU :

Nama lengkap : Fidyia Rizky Amalia
N P M : 1403110033
Jurusan : Ilmu Komunikasi (Humas)
Tabungan sks : 133 sks, IP Kumulatif 3.50...

Menyampaikan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Pemanfaatan Dana Alokasi Nagari (di Nagari Limo Kaum Sumatera Barat)	✓ 24/11-17
2	Peranan Pemerintah Nagari Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (di Nagari Saruaso Sumatera Barat)	
3	Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) dalam Pembangunan Nagari (di Nagari Pagaruyung Sumatera Barat)	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
menetapkan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

Medan, tgl. 24 November 2017.

Ketua,

Nurhasanah Nasution r.sos.mikom

(Fidyia Rizky Amalia)

PB: TASRI SYAMA



Cerdas & Terpercaya
 Web surat ini agar disebutkan
 tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**
Nomor : 158 /SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2003 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi tertanggal **24 November 2017** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **FIDYA RIZKY AMALIA**
 N P M : 1403110033
 Program Studi : Ilmu Komunikasi
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2017 / 2018
 Judul Skripsi : **STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM
 PEMANFAATAN DANA ALOKASI NAGARI (di Nagari
 Limo Kaum Sumatera Barat).**

Pembimbing : ~~Drs. Taarif Syam, M.Si.~~ **Puji Santosa**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 13 Muharram 1437 H / 26 Oktober 2015 M.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa kadaluarsa tanggal 24 November 2018

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal 08 Rabiul Awal 1439 H
 27 November 2017 M



Drs. Taarif Syam, M.Si.

Tembusan :

1. Ketua P.s. Ilmu Komunikasi
2. Pembimbing ybs. Di Medan;
3. Pertinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

ada Yth.

Medan, 22 Desember 2017.

Bapak Dekan FISIP UMSU

dan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMSU :

Nama lengkap : Fidya Rizky Amalia
 N P M : 1403110033
 Jurusan : ILMU KOMUNIKASI / PUBLIC RELATIONS

Sehubungan dengan permohonan mengikuti seminar proposal skripsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. /SK/II.3-AU/UMSU-03/F/20..... tanggal

dengan judul sebagai berikut :
STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM PEMANFAATAN DANA ALOKASI DAERAH (DANAGARI) LIMO KAUM SUMATERA BARAT.


Sehubungan dengan permohonan ini turut saya lampirkan foto copy :

- Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
- Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
- Surat Keterangan Akademik (SKA) yang telah disahkan;
- Surat Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
- Surat bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Surat bukti lunas biaya seminar proposal skripsi;
- Proposal skripsi yang telah disahkan oleh kedua pembimbing (rangkap 5).


Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing


 (Taufiq Syam, M.Si.)

Pemohon,


 (Fidya Rizky Amalia)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-4

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
Nomor : 347/UND/IL.3-AU/UMSU-03/F/2017

Program studi : Ilmu Komunikasi
Hari, Tanggal : Kamis, 28 Desember 2017
W a k t u : 14.00 WIB s/d Selesai
Tempat : LAB. FISIP Gedung C UMSU
Pemimpin Seminar : NURHASANAH NASUTION, S.Sos, M.I.Kom

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggap	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
16	FELIZA ZELMIRA	1403110172	1 IRWAN SYARI, S.Sos., M.AP.	1 YAN HENDRA, M.Si, Dr.	PERAN KOMUNIKASI KELUARGA DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN OBAT TERLARANG OLEH REMAJA DI KELURAHAN MANDAILING TEBING TINGGI
17	FIDYA RIZKY AMALIA	1403110033	1 IRWAN SYARI, S.Sos., M.AP.	1 TASRIF SYAM, Drs, M.Si	STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM PEMANFAATAN DANA ALOKASI NAGARI (DI NAGARI LIMO KAUM SUMATERA BARAT)
18	FAKHRIZA AULA	1403110188	1 LEYLIA KHAIRANI, Dr, M.Si	1 MUHAMMAD THARIQ, M.I.Kom	PESAN MORAL DALAM FILM WHY HIM (ANALISIS SEMIOTIKA ISI PESAN MORAL FILM WHY HIM KARYA JOHN HAMBURG)
19	MUHAMMAD DINAL APRIANSYAH	1403110195	1 LUTFI BASIT, S.Sos., M.I.Kom.	1 MUHAMMAD THARIQ, M.I.Kom	PENGARUH JUMLAH FOLLOWERS INSTAGRAM LPM TEROPONG UMSU DALAM MENARIK MEDIA PARTNER UNTUK MEMASANG IKLAN
20	HERA KUSRINI	1403110189	1 NUR RAHMAH AMINI, S.Ag, MA	1 ASMAWITA, Hj, AM, MA	PERAN SELEBRAM AKUN WARDAH MAULINA TERHADAP KONSEP DIRI WANITA BERCADAR

Medan, 8 Rabbul Akhir 1439 H
28 Desember 2017 M

An. Dekan
Wakil Dekan I





idias of Terpercaya
 surat ini agar disebutkan
 panya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Fidya Rizky Amalia
 NPM : 1403110033
 Jurusan : Ilmu Komunikasi (Public Relations)
 Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Pemanfaat
 Dana Atokasi Nagari (di Nagari Limo Kaum Sumatera Barat)

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
	10/12/17	- Bimbingan BAB I, II dan III	
	13/02/17	- Perbaikan Latar Belakang dan Kerangka Konsep	
	15/12/17	- Disetujui Bab I, II dan III	
	15/02/18	- Bimbingan Kuesioner	
	14/03/18	- Bimbingan Bab IV dan V	
	15/03/18	- Perbaikan Bab IV dan V	
	19/03/18	- Perbaikan Hasil Wawancara	
	20/03/18	- Disetujui untuk di Uji sidang Meja Hijau	

Medan, 20 Maret 2018

Dekan,

Rudianto M.Si
 BRAR ADHANI

Ketua Program Studi,

Murhasanah Nasution S.Sos.M.Ikom

Pembimbing ke : 1.

Puji Santoso S.S., M.SP



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 415/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2018

Pogram Studi : Ilmu Komunikasi
Hari, Tanggal : Kamis, 29 Maret 2018
Waktu : 08,00 s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PEMBIMBING	
21	USWATUN HASANAH	1403110186	Hj. ASMAWITA, AM, MA	Dr. ANANG ANAS AZHAR, MA	ABRAR ADHANI, S.Sos, M.I.Kom.	OPINI MAHASISWA TENTANG TAYANGAN PERNIKAHAN PUTRI PRESIDEN JOKOWI TERHADAP HAK MEMPEROLEH INFORMASI
22	INTAN PUTRI YOSEFA	1403110284	MUHAMMAD SAID HARAHAP, S.Sos, M. I.Kom	Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.Si	AKHYAR ANSHORI, S.Sos, M.I.Kom	EFEK IKLAN TRANSPORTASI ONLINE OLEH ARTIS TERHADAP PENINGKATAN PENGGUNA (Studi Deskriptif Pada Pengguna Gojek di Medan)
23	FIDYA RIZKY AMALIA	1403110033	Dr. YAN HENDRA, M.Si	JUNAIDI, S.Pdi, M.Si	PUJI SANTOSO, S.S, M.SP	STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM PEMANFAATAN DANA ALOKASI NAGARI (di Nagari Limo Kaum Sumatera Barat)
24	GITA NURUL RAMADHANI	1403110053	IRWAN SYARI TANJUNG, S.Sos, MAP	AKHYAR ANSHORI, S.Sos, M.I.Kom	MUHAMMAD SAID HARAHAP, S.Sos, M. I.Kom	EFEKTIVITAS FOTO DALAM MEMBANGUN CORPORATE IDENTITY (Study Pada Media Promosi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) 2018)
25	DHARA SUCI DEWI LESTARI	1403110057	ABRAR ADHANI, S.Sos, M.I.Kom.	ELVITA YENNI, S.S, M.Hum	JUNAIDI, S.Pdi, M.Si	DAMPAK PENGGUNAAN GADGET PADA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER (Study Deskriptif Kualitatif pada Anak di Jalan Pembangunan I Deda Sebij Lubuk Pakam)

Notulis Sidang :

1.

Medan, 10 Rajab 1439 H

27 Maret 2018 M

Ditetapkan oleh :



Ketua,

Panitia Ujian



Sekretaris



Cerdas & Terpercaya
 web surat ini agar disebutkan
 tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Nomor : / KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2018 Medan, 29 Djumadil Awwal 1439 H
 Lampiran : -,- 15 Februari 2018 M
 Hal : *Mohon Diberikan izin*
Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth,
 Bapak Bupati Tanah Datar
 c /q Kepala Kantor Kesbangpol
 Kabupaten Tanah Datar
 di -
 Tempat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : FIDYA RIZKY AMALIA
 N P M : 1403110033
 Program Studi : Ilmu Komunikasi
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2017 / 2018
 Judul Skripsi : STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM PEMANFAATAN DANA ALOKASI NAGARI (DI NAGARI LIMO KAUM SUMATERA BARAT).

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

A.n.Dekan,
 Wakil Dekan I


 Drs. ALE AHMI, M.I.Kom.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)**

Jln. MT. Haryono No. 10 Telp. (0752) 574400 Batusangkar 27281

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI

Nomor : 070/208/KESBANGPOL/2018

Berdasarkan Permendagri Nomor : 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : /KET/II.3-AU/UMSU-03F/2018, tanggal 15 Februari 2018 perihal izin penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud izin penelitian dimaksud dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh:

Nama	: FIDYA RIZKY AMALIA
Pekerjaan	: Mahasiswi
Kartu Identitas	: NPM.1403110033
Maksud dan Obyek	: Izin penelitian
Judul	: "STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM PEMANFAATAN DANA ALOKASI NAGARI (DINAGARI LIMOKAUM SUMATRA BARAT)"
Lokasi Penelitian	: Nagari Lima Kaum.
Waktu	: 6 Maret s.d 10 Maret 2018.
Anggota	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 6 Maret s.d 10 Maret 2018.
7. Melaporkan hasil penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikian surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 06 Maret 2018

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR
SAG TATA USAHA,



Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
2. Dandim 0307 Tanah Datar di Batusangkar.
3. Kapolres Tanah Datar di Batusangkar.
4. Camat Lima Kaum di Lima Kaum.
5. Wali Nagari Lima Kaum di Lima Kaum.
6. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UMSU di Medan.
7. Yang bersangkutan...